



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

IKM DI TENGAH GEMPURAN IMPOR ILEGAL

Eka Budiyantri

Analisis Legislatif Ahli Madya

eka.budiyantri@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Industri Kecil dan Menengah (IKM) memegang peran penting dalam perekonomian Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari kontribusinya yang signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja, inovasi lokal, dan penyebaran kesejahteraan ekonomi. Kementerian Perindustrian mencatat hingga Triwulan III tahun 2024, populasi IKM mencapai 4,52 juta unit usaha (99,77%) dari total sebanyak 4,53 juta unit usaha di sektor industri. Dengan populasi tersebut, IKM berperan menyerap tenaga kerja sebanyak 65,52% dari total tenaga kerja di sektor industri yang berjumlah sekitar 13,11 juta orang. Adapun nilai *output* IKM terhadap industri pengolahan nonmigas tercatat sebesar 21,53% dari total nilai *output* industri nasional. Sementara laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) IKM sebesar 5,26% (*year on year*).

Namun, saat ini muncul tantangan besar yang sedang dihadapi IKM, terutama terkait maraknya impor ilegal. Produk-produk impor dengan harga murah yang masuk tanpa melalui prosedur yang sah memberikan tekanan besar pada produk lokal di pasar domestik dan menyebabkan persaingan yang tidak sehat. Impor ilegal tidak hanya menciptakan persaingan harga yang tidak adil, tetapi juga menggerus pasar produk lokal. Produk impor ilegal ini sering kali tidak memenuhi standar kualitas, namun harganya lebih murah sehingga menarik konsumen yang "sensitif" terhadap harga. Kondisi ini mengakibatkan menurunnya permintaan terhadap produk-produk IKM lokal, "memukul" pendapatan IKM, dan akhirnya banyak pelaku IKM yang merumahkan pekerjanya. Ancaman ini dapat menimbulkan dampak berantai pada perekonomian Indonesia, mulai dari meningkatnya pengangguran hingga menurunnya daya saing ekonomi nasional. Menurut Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB), Nandi Herdian, setidaknya sekitar 1.000 unit IKM terpaksa menutup operasionalnya dengan tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan mencapai ratusan ribu orang.

Terkait persoalan tersebut, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, menyoroti lemahnya pengawasan terhadap arus masuk barang impor. Kurangnya penegakan hukum dan pengawasan di pintu masuk barang impor dianggap menjadi celah utama yang dimanfaatkan oleh pelaku impor ilegal. Hal ini memicu desakan dari berbagai pihak, termasuk DPR, agar pemerintah segera mengambil langkah tegas untuk memperketat pengawasan terhadap masuknya barang impor dan memberikan sanksi yang lebih berat kepada para pelanggar.

Keluhan juga muncul dari pelaku IKM terkait kebijakan fiskal yang dinilai tidak seimbang. Beberapa pelaku IKM menyampaikan bahwa beban perpajakan yang dikenakan cenderung berat, sedangkan produk impor ilegal sering kali masuk tanpa terkena pajak. Hal ini menciptakan ketimpangan yang merugikan bagi IKM. Beban pajak merupakan salah satu tantangan signifikan yang dihadapi oleh pelaku IKM. Pajak sering kali menjadi pengeluaran tetap yang harus dibayarkan meskipun usaha tidak dalam kondisi menguntungkan. Bagi sebagian besar pelaku IKM, terutama yang berskala mikro, kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan sangat terbatas karena kendala likuiditas. Hal ini diperburuk oleh fakta bahwa banyak pelaku IKM masih berada dalam sektor informal dan belum memiliki

pemahaman mendalam terkait sistem perpajakan sehingga mereka sering merasa terbebani oleh kerumitan aturan dan prosedur perpajakan.

Atensi DPR

DPR RI khususnya Komisi VII dapat mengambil sejumlah langkah strategis untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh IKM dalam menghadapi maraknya impor ilegal. Salah satunya adalah mendorong pemerintah memperketat pengawasan di pintu masuk barang impor. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kerja sama antar lembaga terkait, seperti bea cukai dan aparat penegak hukum, serta menerapkan teknologi canggih untuk mendeteksi barang yang masuk tanpa prosedur sah. Selain itu, Komisi VII DPR RI juga dapat mendorong pemerintah untuk menindak secara tegas pelaku dan memperkuat regulasi dengan memberlakukan sanksi yang lebih berat bagi pelaku impor ilegal guna memberikan efek jera. Dalam aspek kebijakan fiskal, Komisi VII DPR RI perlu mendorong pemerintah lebih berpihak pada IKM dengan memberikan insentif pajak untuk IKM, serta memastikan bahwa produk impor ilegal dikenakan pajak secara adil.

Sumber

agrofarm.co.id, 12 Maret 2025;
antaranews.com, 13 Maret 2025;
beritasatu.com, 14 Maret 2025; dan
ekonomi.bisnis.com, 9 Maret 2025.

Minggu ke-2 Maret
(10 s.d. 16 Maret 2025)



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

EDITOR

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikhah P. S.
Fieka Nurul Arifa

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*